

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJENE  
(Studi Kasus Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DPKAD)**

**MUHAMMAD FAJRI  
105730412313**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2017**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJENE  
(Studi Kasus Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DPKAD)**



**MUHAMMAD FAJRI  
105730412313**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2017**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No.259 Fax (0411)860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Analisis Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene (Studi Kasus Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah DPKAD)  
Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FAJRI  
No. Stambuk : 10573 04123 13  
Jurusan : AKUNTANSI  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

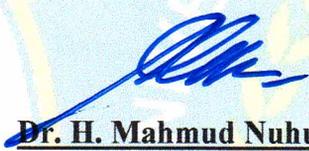
Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

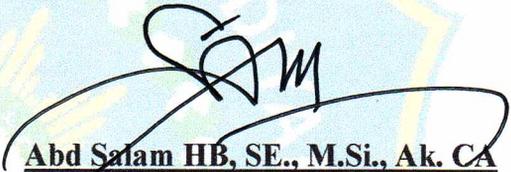
Makassar, 14 Oktober 2017

**Menyetujui,**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

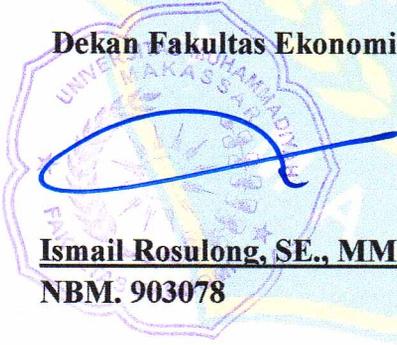
  
**Dr. H. Mahmud Nuhung, MA.**

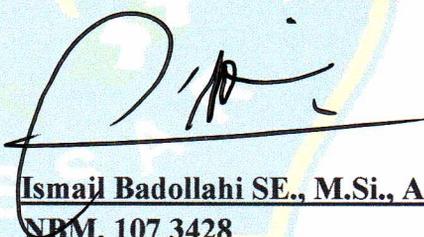
  
**Abd Salam HB, SE., M.Si., Ak. CA**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ekonomi,**

**Ketua Jurusan Akuntansi,**

  
**Ismail Rosulong, SE., MM.**  
NBM. 903078

  
**Ismail Badollahi SE., M.Si., Ak. CA**  
NBM. 107 3428

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama MUHAMMAD FAJRI NIM. 10573 04123 13 ini telah diperiksa dan di terimah oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : /tahun 1439H/2017M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Sabtu 14 Oktober 2017 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Muharram 1439 M  
14 Oktober 2017 H

### Panitia Ujian

1. Pengawasan Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM. (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM. (.....)  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM. (.....)  
(Wakil Dekan I Fakultas ekonomi Dan Bisnis)

4. Penguji : Drs. H. Sultan Sarda, MM. (.....)

Andi Arman, SE., M.Si., Ak. CA. (.....)

Ismail Badollahi SE., M.Si., Ak.CA (.....)

Faidhul Adzhiem, SE., M.Si. (.....)

## **MOTTO**

Ilmu itu lebih baik daripada harta, ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu akan berkurang jika dibelanjakan tetapi ilmu akan bertambah jika diamalkan.

Imam Ali bin Abu Tholib. Ra

Jika kau mempunyai waktu luang untuk memikirkan akhir yang indah, Kenapa tak kau gunakan waktumu untuk menjalani kehidupan indah sampai akhir

Sakata gintoki (Anime Gintama)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kehadiran ALLAH SWT., skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku bapak dan ibu yang telah mendidikku semenjak kecil hingga sampai sekarang ini, serta selalu mengiringi kehidupanku dengan penuh rasa kasih sayang, doa, dan kekuatan.
- ❖ Almamaterku Universitas Muhammadiyah Makassar

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumene tahun 2009-2013 dilihat dari : 1. Rasio Efektivitas PAD, 2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, 3. Rasio Pertumbuhan, dan 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Majene. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Majene dilihat dari 1. Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan tidak Efektif, karena rata-rata efektivitasnya sebesar 92,60% 2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong kurang Efisien tapi hampir berimbang karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 100,29%, 3. Rasio Pertumbuhan pendapatan, PAD, Belanja Tidak Langsng selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan Pertumbuhan Belanja Langsung fluktuatif 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 5,46%.

Kata kunci : Kinerja Keuangan Pengelolaan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat menyusun skripsi dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Pengelolah Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene (Studi Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Darerah DPKAD majene)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, sebagai suri tauladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin sepanjang sejarah kepemimpinan.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, dari berbagai pihak dan berkah dari Allah swt sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Pada kesempatan ini saya sebagai penulis memohon izin untuk mengucapkan terimakasih yang sangat tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayah Nurdin S.SOS dan ibu Tasmiah S.Pd yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik tanpa rasa lelah. Terimakasih saya ucapkan karena telah memberikan segala dukungan dan motivasi yang sangat luar biasa kepada penulis, baik itu berupa kasih sayang, dukungan moral dan materi serta do'a yang tak ada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada orang tua penulis. Penulis berdoa agar nantinya bisa membahagiakan kedua orang tua penulis meskipun sangat penulis sadari bahwa cinta kasih dan sayangnnya yang tulus takkan mampu untuk penulis balas.

Terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya penulis juga sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menambah ilmu di UNISMUH Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimbah ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Dr.H.Mahmud Nuhung,SE,MA dan bapak Abd. Salam HB.SE.,M,Si.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan sumbangan pemikirannya dalam mengarahkan dan membimbing penulis serta dengan sabarnya menghadapi penulis hingga pen mengarahkan dan membimbing penulis serta dengan sabarnya menghadapi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membagi ilmunya yang bermanfaat kepada penulis.
5. Pemerintah kabupaten Majene yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dikabupaten majene.Diantaranya : Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah
6. Terimakasih kepada seluruh keluarga, teman-teman yang penulis tidak sempat saya tuliskan namanya satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya,

atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga hikmah dan amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima di sisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin YaRabbal Aamin.

Makassar, September 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah .....	9
B. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	11
C. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	14
D. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	15
E. KLaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	16
F. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	19
G. Penelitian Terdahulu .....	25

H. Kerangka Fikir .....	29
I. Hipotesis .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Lokasi Dan Penelitian.....	32
B. Definisi Operasional Variabel .....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Analisis Data.....	33
<b>BAB IV PROFIL KABUPATEN MAJENE.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum.....	37
B. Gambaran Umum DPKAD Majene .....	41
<b>BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Data Khusus .....	47
B. Analisis Data.....	51
C. Pembahasan.....	57
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Fikir.....	30
Gambar 2	Struktur Organisasi DPKAD Majene.....	47
Gambar 3	Grafik Rasio Efektivitas PAD DPKAD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2011-2015 .....	53
Gambar 4	Grafik Rasio Efisiensi Keuangan Daerah DPKAD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2011-2015 .....	55
Gambar 5	Grafik Rasio Pertumbuhan DPKAD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2011-2015 .....	57
Gambar 3	Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah DPKAD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2011-2015 .....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan .....	21
Tabel 2	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	24
Tabel 3	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan .....	34
Tabel 4	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	36
Tabel 5	APBD Kabupaten Majene Tahun 2011-2013 .....	48
Tabel 6	APBD Kabupaten Majene Tahun 2014-2015 .....	49
Tabel 7	Realisasi APBD Kabupaten Majene Tahun 2011-2013.....	50
Tabel 8	Realisasi APBD Kabupaten Majene Tahun 2014-2015.....	51
Tabel 9	Penghitungan Rasio Efektivitas PAD DPKAD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2011-2015.....	53
Tabel 10	Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah DPKAD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2011-2015.....	54
Tabel 11	Penghitungan Rasio Pertumbuhan DPKAD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2011-2015 .....	56
Tabel 13	Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah DPKAD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2011-2015 .....	58

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32

tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Regulasi aturan-aturan tersebut dirasakan sangat menyulitkan dalam hal pelaksanaannya karena disamping butuh waktu untuk mempelajari sekaligus memahami, kendala berikutnya adalah adanya aturan-aturan pelaksanaan yang belum dikeluarkan, baik itu turunan dari Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah daerah itu sendiri sampai sekarang belum diwujudkan, tapi pemerintah tentunya tidak boleh hanya menunggu dengan tidak melaksanakan aturan yang ada. Kalau hal ini dilakukan sudah pasti ada pemeriksaan, maka akan menjadi temuan tentunya. Perubahan-perubahan aturan yang demikian cepat akan banyak menimbulkan masalah-masalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah terutama pada pertanggung jawaban akhir kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang

lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Halim (2012:167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah dua belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan.

Meskipun laporan keuangan sudah bersifat general purposive, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak. Tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Majene. Karena itu Pemerintah Kabupaten Majene sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Kabupaten Majene berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Untuk itu masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah

Kabupaten Majene, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah Kabupaten Majene apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Pada umumnya ada tiga permasalahan yang biasa dihadapi pemerintan daerah yaitu ketidakefektifan, inefisiensi dan *private inurement* (penggunaan dana untuk kepentingan individu). Hal ini disebabkan karena tidak terdapat mekanisme dasar pertanggung jawaban yang baku seperti organisasi bisnis. Organisasi pemerintahan tidak mengenal kepemilikan (*self interest*) yang dapat memaksakan pencapaian tujuan. Pemerintah daerah juga tidak mementingkan faktor persaingan yang seringkali digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, disamping itu, pemerintah daerah tidak memiliki barometer keberhasilan seperti pada organisasi bisnis sehingga sulit untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pemerinta daerah.

Menilik pada konteks desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, konsekuensinya adalah adanya alokasi penyediaan barang publik pada pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Selain itu, juga akan mempengaruhi tanggung jawab dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relations*). Hubungan keuangan antar pemerintah merujuk pada hubungan keuangan antara berbagai tingkatan pemerintah dalam suatu negara dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan Negara dan pola pengeluarannya termasuk kekuasaan. Mulai dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi terhadap tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Implikasi langsungnya adalah meningkatnya pendanaan oleh

pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Sebelum era otonomi dan desentralisasi, pendanaan utama pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat dan PAD dengan pajak dan retribusi sebagai instrumen utama penerimaan daerah. Situasi ini menjadi semakin kompleks mengingat kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dengan berbagai keanekaragamannya, sehingga potensi kesenjangan keuangan antar daerah (horizontal) semakin besar. Potensi daerah baik berupa sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) tidak tersebar secara merata pada tiap-tiap daerah otonom. Permasalahan horizontal (antar pemerintah daerah) kemudian muncul dalam hal upaya mengumpulkan sumber pendanaan untuk biaya pembangunan. Pemerintah pusat berupaya untuk mengurangi kesenjangan ini dengan mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemberian dana perimbangan ini ditujukan untuk mengurangi adanya disparitas fiskal vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah) dan horizontal (antar pemerintah daerah), sekaligus untuk membantu daerah dalam membiayai pengeluaran pembangunannya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Majene”**

## **B. Rumusan Masalah**

Di antara pertanyaan mendasar, yang perlu diperhatikan adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Majene jika dilihat dari Rasio Efektivitas?
2. Bagaimana kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Majene jika dilihat dari Rasio Efisiensi ?
3. Bagaimana kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Majene jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan ?
4. Bagaimana kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Majene jika dilihat dari Rasio Kemandirian ?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Majene jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD
2. Kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Majene jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
3. kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Majene jika dilihat dari Rasio Kemandirian ?
4. Kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Majene jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Majene merupakan sebagai bahan informasidan pertimbangan mengenai kinerja keuangan daerah agar dapat meningkatkankinerja keuangannya.
2. Bagi Penulis merupakan penambahan wawasan dalam khasanah bidang ilmu pengelolaan keuangan.
3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang terkait dengan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sebelum menguraikan sistem pengelolaan keuangan daerah terlebih dahulu dikemukakan pendapat mengenai pengertian sistem itu sendiri. pengertian sistem menurut Tata Sutabri dalam bukunya konsep sistem informasi (2011: 4) adalah Sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu sedangkan prosedur Menurut Mulyadi (2010:5) dalam bukunya yang berjudul “Sistem Akuntansi” mengemukakan bahwa: “Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah sistem atau cara pengelolaan keuangan daerah secara berdayaguna dan berhasil guna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD,

penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan /penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD yang disusun oleh pemerintah daerah telah mengalami perubahan dari yang bersifat incremental menjadi anggaran berbasis kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi. Anggaran berbasis kinerja dikenal dalam pengelolaan keuangan daerah sejak diterbitkannya PP nomor 105 tahun 2000 yang dalam pasal 8 dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005

Dilihat dari aspek masyarakat (customer) dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat

meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Dilihat dari sisi pengelolaan keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kontribusi terhadap APBD meningkat tiap tahun anggaran hal ini didukung pula dengan tingkat efektivitas dari penerimaan daerah secara keseluruhan sehingga adanya kemauan dari masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pajak dan retribusi.

#### **B. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo,2010).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam

batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi,1986:199).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Ibnu Syamsi, 1986: 99).

1. Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

4. Kemampuan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan

pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### **C. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002: 121) :

1. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam (Abdul Halim 2007:230):

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

#### **D. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi :

1. Indikator Masukan (Inputs)

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya : jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

2. Indikator Proses (Process)

Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya : ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3. Indikator Keluaran (Output)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya : jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya : tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

#### 5. Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya : tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

#### 6. Indikator Dampak (Impact)

Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya : peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

### **E. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

- a. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori :
  - a. Pendapatan asli daerah, merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
  - b. Dana perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang di alokasikan pada daerah untuk membiyai kebutuhan dananya.
  - c. Lain-lain pendapatan yang sah, adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari Pemerintah Pusat.
2. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu :
  - a. Belanja aparatur daerah, merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas, pembelian bangunan gedung dan lain sebagainya.

- b. Belanja pelayanan publik, merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya dan sebagainya.
  - c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menjadi :
- a. Sumber penerimaan daerah, yaitu :
    - 1. Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu.
    - 2. Penerimaan pinjaman dan obligasi.
    - 3. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.
    - 4. Transfer dari dana cadangan.
  - b. Sumber pengeluaran daerah, yaitu :
    - 1. Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.
    - 2. Penyertaan modal.
    - 3. Transfer ke dana cadangan.
    - 4. Sisa lebih anggaran tahun sekarang.
- b. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

- c. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

#### **F. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2007: 231).

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah (Abdul Halim, 2007: 232) adalah :

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

3. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

a. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi 2010:143). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya . Rumus rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2012:187), adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektivitas berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti efektif.

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan

realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul Halim 2007:234). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Biaya}} \times 100 \%$$

Tabel 1. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber : Mohamad Mahsun (2012:187)

### c. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi 2010:138). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim 2007:241). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P<sub>n</sub> = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P<sub>0</sub> = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja

Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

#### d. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim 2007:L-5). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan

demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan ) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013:82)

1. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Rahmad (2009) hasil penelitiannya menunjukkan 1. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman. 2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.

Aryanto (2011) dengan penelitian terkait kemandirian keuangan kabupaten/kota di Sumatera Selatan. hasilnya nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi hanya sebesar 17,28% yaitu pada Kota Palembang, dan tertinggi kedua yaitu Kota Lubuk Linggau dengan rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 6,94%. Daerah yang memiliki kemampuan keuangan terendah yaitu OKU Selatan dengan rasio kemandirian keuangan daerah hanya sebesar 1,17%.

Usman (2012) dengan penelitiannya yang menunjukkan bahwa kemandirian Pemerintah Kabupaten Gorontalo masih sangat rendah, rata-rata pertumbuhan PAD selama tahun analisis (2007-2010) tidak baik, dan dilihat dari rasio efektivitas menunjukkan bahwa pengelolaan PAD telah efektif.

Astuti (2013) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian tahun 2007-2011 masih sangat rendah, Rasio efektifitas kinerja keuangan tahun 2007 tidak efektif, tahun 2008 menunjukkan kinerja keuangan cukup efektif, tahun 2009 dan 2010 menunjukkan kinerja keuangan sangat efektif, dan tahun 2011 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah efektif. Rasio efisiensi tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sangat efisien. Rasio aktivitas tahun 2007 dan 2011 menunjukkan bahwa rasio keserasian diprioritaskan untuk belanja rutin. Rasio Pertumbuhan APBD tahun 2007-2011 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan negatif.

Hendra (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Tingkat kemandirian masih dalam kriteria “kurang” dengan pola hubungan dengan Pemerintah Pusat yang bersifat “instruktif”. Tingkat kemampuan masih dalam kriteria “kurang”. Aktivitas keuangan untuk pembangunan termasuk dalam kriteria “baik”. Efektifitas keuangan termasuk dalam kriteria efektif. Efisiensi keuangan termasuk dalam kriteria “efisien”. Pertumbuhan keuangan termasuk dalam kriteria “baik”. 2. Tingkat kemiskinan tidak sepenuhnya mengalami penurunan dari tahun-ketahun. Namun demikian penurunan tingkat kemiskinan Kota Pekanbaru terjadi pada tahun 2011 dan 2012. 3. Secara parsial tingkat kemampuan, aktivitas keuangan, efektifitas, efisiensi dan tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru. 4. Secara simultan, tingkat kemampuan, aktivitas keuangan, efektifitas, efisiensi dan tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru.

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Rahmad (2009)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.	1. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman. 2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.
2	Aryanto (2011)	Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan,	Rasio Kemandirian keuangan	Hasil Penelitian Menyetakan nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi hanya sebesar 17,28% yaitu pada Kota Palembang, dan tertinggi kedua yaitu Kota Lubuk Linggau dengan rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 6,94%. Daerah yang memiliki kemampuan keuangan terendah yaitu OKU Selatan dengan rasio kemandirian keuangan daerah hanya sebesar 1,17%.
3	Usman (2012)	Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pada	Rasio Kemandirian	Disimpulkan bahwa kemandirian Pemerintah Kabupaten Gorontalo masih sangat rendah, rata-rata

		Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.		pertumbuhan PAD selama tahun analisis (2007-2010) tidak baik, dan dilihat dari rasio evektivitas menunjukkan bahwa pengelolaan PAD telah efektif.
4	Astuti (2013)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.	Rasio Kemandirian, Rasio efektifitas, Rasio efisiensi, Rasio aktivitas rasio keserasian. Rasio Pertumbuhan	hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian tahun 2007-2011 masih sangat rendah, Rasio efektifitas kinerja keuangan tahun 2007 tidak efektif, tahun 2008 menunjukkan kinerja keuangan cukup efektif, tahun 2009 dan 2010 menunjukkan kinerja keuangan sangat efektif, dan tahun 2011 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah efektif. Rasio efisiensi tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sangat efisien. Rasio aktivitas tahun 2007 dan 2011 menunjukkan bahwa rasio keserasian diprioritaskan untuk belanja rutin. Rasio Pertumbuhan APBD tahun 2007-2011 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan negatif.
5	Hendra (2015)	Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengaruhnya	Rasio kemandirian, Rasio efektifitas, Rasio efisiensi,	Tingkat kemiskinan tidak sepenuhnya mengalami penurunan dari tahun-ketahun. Namun demikian penurunan tingkat

		terhadap tingkat kemiskinan di kota pekanbaru	Rasio aktivitas rasio keserasian. Rasio Pertumbuhan	kemiskinan Kota Pekanbaru terjadi pada tahun 2011 dan 2012. Secara parsial tingkat kemampuan, aktivitas keuangan, efektifitas, efisiensi dan tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru. 4. Secara simultan, tingkat kemampuan, aktivitas keuangan, efektifitas, efisiensi dan tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru.
--	--	---	--	--

## H. Kerangka Berpikir

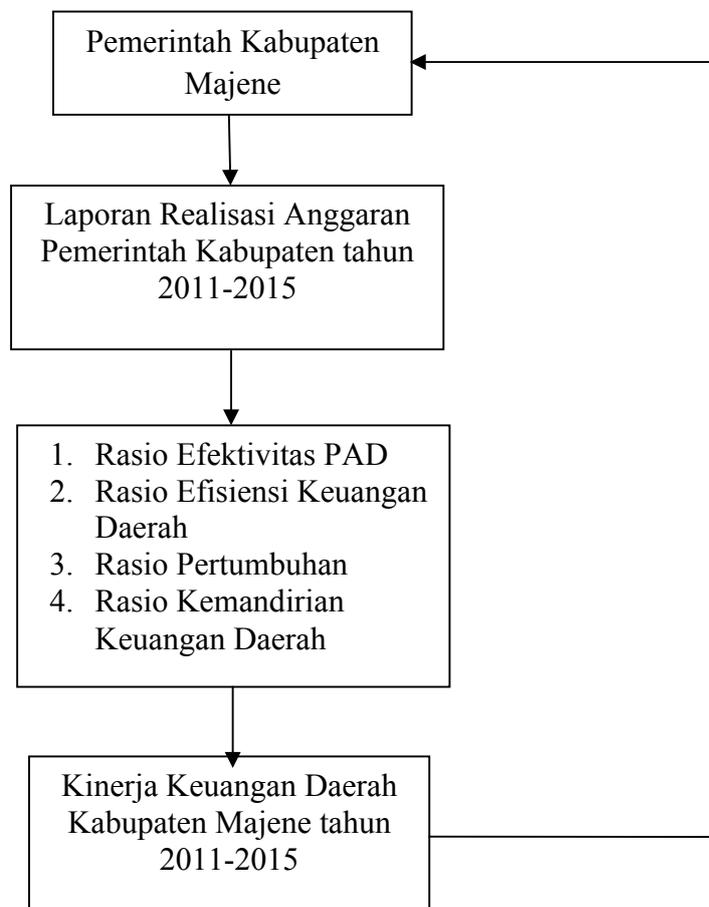
Menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPPKAD Kabupaten Kebumen dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Di bawah ini ada empat macam rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis Kinerja Keuangan DPKAD

Kabupaten Kebumen :

- a. Rasio Efektivitas PAD
- b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
- d. Rasio Pertumbuhan
- e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dengan menggunakan beberapa rasio di atas dapat diketahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen. Jika semua rasio di atas menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Kebumen dapat dikatakan baik.

**Gambar 2.1 kerangka Fikir**



## **G. Hipotesis**

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Majene dilihat dari Rasio Efektivitas sudah Efektif
2. Kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Majene dilihat dari Rasio Efisiensi sudah Efisien
3. Kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Majene dilihat dari Rasio Pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan
4. Diketahui kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Majene dilihat dari Rasio Kemandirian sudah mampu membiayai pembangunan dan belanja daerah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini berfokus pada Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) khusus pengelolah keuangan pendapatan daerah sebagai unit analisis dari Pemerintah Kabupaten Majene, khususnya pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan dari bulan 7 sampai bulan 9 2017.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo,2010).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi.

Metode Dokumentasi ini melakukan pengumpulan data dari DPKAD Kabupaten Majene berupa data umum dan data khusus. Data umum berupa :

1. Gambaran umum Kabupaten Majene.
2. Gambaran umum DPKAD Kabupaten Majene.

Dan data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Majene tahun anggaran 2011-2015.

### **D. Analisis Data**

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolok ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi 2010:143). Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100 \%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2012:187), adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (  $x < 100\%$  ) berarti tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (  $x = 100\%$  ) berarti efektivitas berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (  $x > 100\%$  ) berarti efektif.

## 2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100 \%$$

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

<b>Kriteria Efisiensi</b>	<b>Persentase Efisiensi</b>
100% keatas	Tidak Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber : Mohamad Mahsun (2012:187)

### 3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi 2010:138). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

$P_n$  = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

$P_0$  = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

### 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak

sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim 2007:L-5). Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$$

Tabel 4. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian %</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013:82)

## **BAB IV**

### **PROFIL KABUPATEN MAJENE**

#### **A. Gambaran umum**

Kabupaten Majene merupakan salah satu bagian wilayah administratif dari Provinsi Sulawesi Barat yang pembentukannya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Kabupaten Majene memiliki andalan di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kekhususan dan pangsa pasar tersendiri yang memberikan posisi yang cukup strategis bagi perkembangan perekonomian dan pembangunan

##### **a. Kondisi Geografi Daerah**

Kabupaten Majene merupakan salah satu dari 6 kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir Pantai Barat Propinsi Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara. Letak geografis Kabupaten Majene berada pada antara 20 38' 45" – 30 38' 15" Lintang Selatan dan antara 1180 45' 00" – 1190 4' 45" Bujur Timur, dengan jarak ke ibukota Propinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 146 km. Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 km<sup>2</sup> atau 5,6% dari luas Propinsi Sulawesi Barat. Adapun batas-atas Kabupaten Majene adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju

Sebelah Timur : Kabupaten Polewali Mandar

Sebelah Selatan : Teluk Mandar

Sebelah Barat : Selat Makassar

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Majene dan sekitarnya secara umum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh angin musim disebabkan wilayahnya berbatasan dengan laut lepas (Selat Makassar dan Teluk Mandar). Kondisi iklim di Kabupaten Majene memiliki rata-rata temperatur berkisar 27,850 C, dengan suhu minimum 27,10 C dan suhu maksimum 28,600 C. Menurut catatan Stasiun Meteorologi dan Geofisika, kelembaban udara di Kabupaten Majene dan sekitarnya sepanjang Tahun 2015 berkisar antara 70,8 persen sampai 82,7 persen atau rata-rata kelembaban udara berkisar 78,1 persen. Curah hujan di Kabupaten Majene tertinggi pada Bulan Januari sebesar 185,9 mm kubik dengan 21 HH, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September sebesar 20,6 mm kubik dengan jumlah 5 HH.

#### b. Topografi

Dari 8 kecamatan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur merupakan kecamatan yang terletak di Ibukota Kabupaten Majene, dengan kondisi wilayah yang relatif datar. Sedangkan enam kecamatan lainnya yaitu Pamboang, Sendana, Tammerodo, Tubo, Malunda & Ulumanda didominasi wilayah berbukit dan

pegunungan. Persentase luas wilayah Kabupaten Majene dengan rata-rata ketinggian lokasi yang berada pada ketinggian 100 – 500 mdpl adalah 38,7%. Berdasarkan klasifikasi bentang lahan, Kecamatan Banggae dan Banggae Timur merupakan wilayah yang relatif lebih datar, sedangkan wilayah kecamatan lainnya lebih dominan berupa wilayah berbukit dan pegunungan. Berdasarkan klasifikasi wilayah menurut kelas ketinggian tempat dari permukaan laut, wilayah Kabupaten Majene yang berada pada kelas ketinggian 100 – 500 m dpl mencapai 38,7% dari luas wilayah kabupaten dan yang berada pada ketinggian 500 – 1000 m dpl mencapai 35,98%.

#### c. Wilayah Administrasi & Pembangunan

Kabupaten Majene terdiri atas 8 kecamatan dan 82 desa/kelurahan. Adapun wilayah administrasi kecamatan tersebut adalah Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda.

Kecamatan Banggae dan Banggae Timur adalah dua kecamatan dengan luas wilayah terkecil dengan luas wilayah masing-masing 2,65% untuk Kecamatan Banggae dan 3,17% untuk Kecamatan Banggae Timur dari luas total wilayah Kabupaten Majene, sementara Kecamatan Ulumanda merupakan wilayah kecamatan terluas dibanding dengan luas wilayah kecamatan lainnya yakni; 456,06 km<sup>2</sup> atau 48,10%, kemudian Kecamatan Malunda dengan luas wilayah 187,85 Km<sup>2</sup> atau 19,81%.

Dalam rangka terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan bergulirnya beberapa peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan pemerintah daerah, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka terdapat banyak hal yang harus disesuaikan dan diterapkan oleh pemerintah daerah di dalam pengelolaan keuangan pemerintahannya. Sejalan dengan itu, penatausahaan dan pelaksanaan keuangan daerah juga mengalami pembaharuan guna mendukung pelaksanaan dan pelaporan realisasi rencana keuangannya.

Dengan ketentuan di atas mewajibkan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **B. Gambaran Umum DPKAD Majene**

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Majene sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah Kabupaten Majene utamanya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan pelayanan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah serta pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup kerjanya. Adapun kewenangannya yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah, menyusun laporan keuangan daerah serta menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan aset daerah.

Adapun visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Majene adalah sebagai berikut:

### **1. Visi**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene dijiwai oleh semangat ingin berubah kearah yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan keuangan kepada perangkat daerah kabupaten dan masyarakat (pihak ketiga). Semangat ingin berubah ke arah yang lebih baik pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan secara komprehensif, sistematis dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi oleh suatu

visi yang ingin diwujudkan. Visi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran dan target yang ditetapkan. Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene dapat dirumuskan sebagai berikut; “Pengelola Keuangan Daerah yang Terpercaya Guna Mendorong Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Lokal Governance*)”. Visi yang dirumuskan tersebut merupakan gambaran yang menantang dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPKAD yang mempunyai kompetensi pelayanan administratif dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

## 2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu;

1. Mendorong meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sesuai ketentuan yang berlaku sebagai perwujudan eksistensi dan kemajuan daerah.
2. Mewujudkan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel dan tepat waktu.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Mewujudkan pelayanan pembayaran tagihan keuangan yang semakin baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

### 3. Tujuan

Sebagai penjabaran visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene dalam jangka menengah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai hingga lima tahun ke depan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai Ketentuan yang berlaku sebagai perwujudan eksistensi dan kemajuan daerah.
2. Tercapainya penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel dan tepat waktu.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Terwujudnya pelayanan pembayaran tagihan keuangan yang semakin baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 4. Sasaran

1. Meningkatnya penerimaan pendapatan secara optimal
2. Terselenggaranya sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah yang semakin andal dan tepat waktu.

3. Meningkatnya wawasan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Terselenggaranya sistem dan prosedur pelayanan pembayaran tagihan keuangan yang semakin baik (prima).
5. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene menyusun strategi secara komprehensif yang akan ditempuh, yaitu;

1. Melakukan usaha-usaha dalam rangka menggali dan atau meningkatkan sumber-sumber (potensi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kajian, evaluasi, survey dan regulasi terhadap peraturan daerah yang berlaku.
  2. Pengkajian rencana anggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang tepat sasaran dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi padakepentingan publik.
  3. Meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan teknis bagi SDM DPPKAD dan SDM SKPD terkait di Bidang Keuangan, melalui Diklat, bimtek, sosialisasi dan pelatihan di kantor sendiri (PKS).
  4. Mengembangkan dan menerapkan standar prosedur operasional (standar operating procedure) (SOP) secara konsisten.
6. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene adalah;

1. Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro.
2. Mengembangkan manajemen dan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang andal.
3. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward and punishment terhadap prestasi kerja yang terukur.
4. Terciptanya berbagai Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati, Surat Edaran Bupati, Peraturan Kepala Dinas, Surat Keputusan Kepala Dinas, Surat Edaran Kepala Dinas, yang terkait dengan proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

## BAB V

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Khusus

##### 1. APBD Kabupaten Majene Tahun 2011-2015

Tabel 5. APBD Kabupaten Majene Tahun 2011-2013 (Dalam ribuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		
		2011	2012	2013
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>458.156.607.760,23</b>	<b>520.714.654.099,21</b>	<b>597.336.447.221,41</b>
1	Pendapatan asli daerah	7.933.928.730,00	22.641.980.322,21	24.022.773.160,00
2	Dana perimbangan	374.529.776.937,00	447.443.212.039,00	512.207.852.053,00
3	Lain-lain pendapatan yang sah	75.692.902.093,23	50.629.461.738,00	61.105.824.008,41
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	<b>468.656.607.760,23</b>	<b>522.748.108.168,06</b>	<b>590.037.251.765,41</b>
1	Belanja Tidak langsung	273.681.054.506,83	304.900.214.398,06	313.608.162.813,41
2	Belanja langsung	194.975.553.253,40	217.847.893.770,00	276.429.088952,00
	Surplus/defisit	10.500.000.000,00	2.033.454.068,85	539.708.574.678,11

Sumber data : DPKAD Majene

Tabel 6. APBD Kabupaten Majene Tahun 2014-2015 (Dalam ribuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun	
		2014	2015
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>679.593.174.306,36</b>	<b>793.626.751.412,97</b>
1	Pendapatan asli daerah	60.113.206.364,00	45.910.511.046,56
2	Dana perimbangan	540.874.512.264,00	622.742.079.000,00
3	Lain-lain pendapatan yang sah	78.605.455.678,36	121.974.161.366,041
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	<b>680.417.155.357,41</b>	<b>798.122.981.615,32</b>
1	Belanja Tidak langsung	349.863.358.844,41	429.992.199.012,01
2	Belanja langsung	330.553.796.513,00	368.130.782.603,31
	Surplus/defisit	7.299.195.456,00	4.495.230.202,35

Sumber data : DPKAD Majene

## 2. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Majene Tahun 2011-2015

Tabel 7. Realisasi APBD Kabupaten Majene Tahun 2011-2013 (Dalam ribuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		
		2011	2012	2013
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>468.533.180.713,62</b>	<b>508.575.045.828,60</b>	<b>596.607.458.712,56</b>
1	Pendapatan asli daerah	8.831.055.548,62	15.389.348.488,60	21.901.551.954,15
2	Dana perimbangan	378.305.489.050,00	443.493.528.109,00	513.649.266.423,00
3	Lain-lain pendapatan yang sah	81.396.636.115,00	49.692.169.231,00	61.056.640.335,41
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	<b>458.316.708.339,03</b>	<b>508.533.876.256,38</b>	<b>588.161.221.865,28</b>
1	Belanja Tidak langsung	282.728.222.244,03	308.096.282.086,38	331.206.122.884,28
2	Belanja langsung	175.588.486.095,00	200.437.594.170,00	256.955.098.981,00
	Surplus/defisit	10.216.472.374,59	41.169.572,22	8.446.236.847,28

Sumber data : DPKAD Majene

Tabel 8. Realisasi APBD Kabupaten Majene Tahun 2014-2015 (Dalam ribuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun	
		2014	2015
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>672.757.348.789,68</b>	<b>782.530.360.623,56</b>
1	Pendaptan asli darah	53.921.491.920,68	45.231.988.393.56
2	Dana perimbangan	542.475.050.755,00	616.672.780.689.00
3	Lain-lain pendapatan yang sah	76.360.806.114,00	120.625.591.541,00
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	<b>668.398.232.931,38</b>	<b>782.708.572.910,96</b>
1	Belanja Tidak langsung	387.926.871.310,38	461.453.337.188,60
2	Belanja langsung	280.471.461.621,00	321.255.235.722,36
	Surplus/defisit	8. 446.236.847,28	178.212.287,40

Sumber data : DPKAD Majene

## B. Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah DPKAD Kabupaten Majene dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPKAD Kabupaten Majene dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2011-2015. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Majene pada penelitian ini adalah: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Majene yang didapat dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Majene. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Majene. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

### 1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$$

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

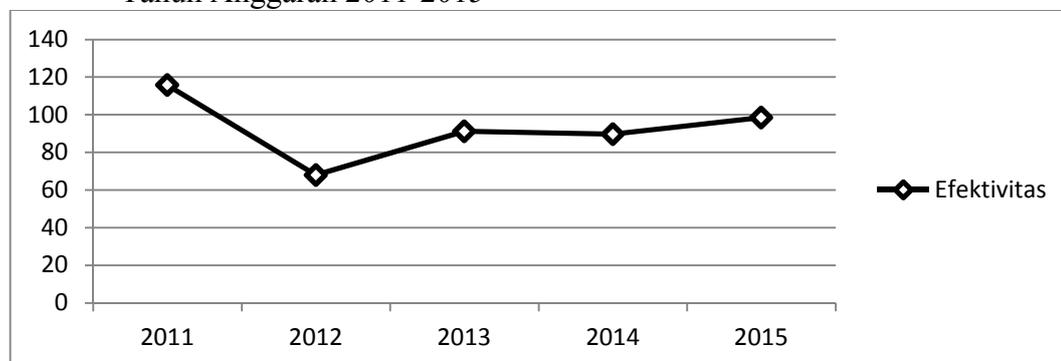
Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Penghitungan Rasio Efektivitas PAD DPKAD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2011	7.933.928.730,00	8.831.055.548,62	115,68	Efektif
2012	22.641.980.322,21	15.389.348.488,60	67,97	Tidak Efektif
2013	24.022.773.160,00	21.901.551.954,15	91,16	Tidak Efektif
2014	60.113.206.364,00	53.921.491.920,68	89,69	Tidak Efektif
2015	45.910.511.046.56	45.231.988.393.56	98,52	Tidak Efektif

Sumber Data : DPKAD Kabupaten Majene (diolah)

Grafik 1. Penghitungan Rasio Efektivitas PAD DPKAD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2011-2015



Sumber Data : DPKAD Kabupaten Majene (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 9. di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan DPKAD Kabupaten Majene pada tahun 2012 sampai 2015 tidak efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% yaitu 67,97%, 91,16%, 89,69% dan 98,52%. Sedangkan untuk tahun 2011 sudah efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 115,68%.

## 2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100 \%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

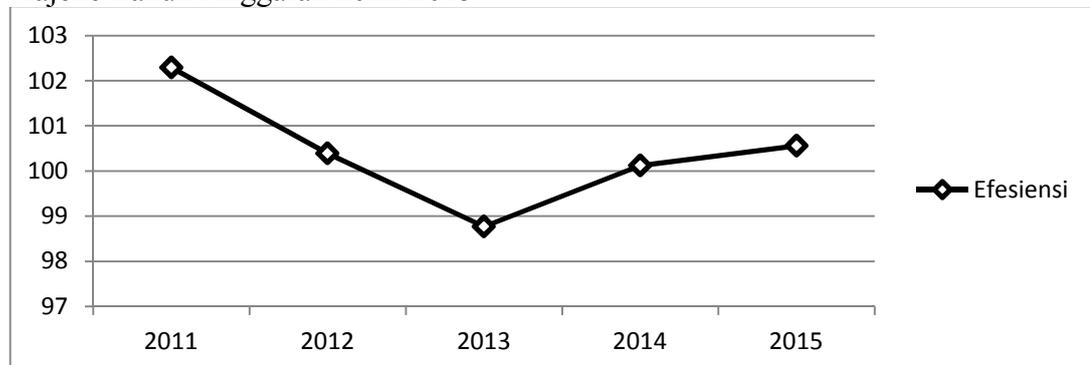
Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10. Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah DPKAD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2011	468.656.607.760,23	458.156.607.760,23	102,29	Tidak Efisien
2012	522.748.108.168,06	520.714.654.099,21	100,39	Efisiensi Berimbang
2013	590.037.251.765,41	597.336.447.221,41	98,77	Efisien
2014	680.417.155.357,41	679.593.174.306,36	100,12	Efisiensi Berimbang
2015	798.122.981.615,32	793.626.751.412,97	100,56	Efisiensi Berimbang

Sumber Data : DPKAD Kabupaten Majene (diolah)

Grafik 1. Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah DPKAD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2011-2015



Sumber Data : DPKAD Kabupaten Majene (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 10. di atas dapat diketahui bahwa Efisiensi Keuangan Daerah DPKAD Kabupaten Majene pada tahun 2011, 2 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya di atas 100%. Total belanjanya melebihi total pendapatan daerah. Pada tahun 2013 efisiensinya tergolong Efisien yaitu sebesar 98,77%. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja. Sedangkan tahun 2012, 2014 dan 2015 Efisiensinya berimbang karena rasionya 100 %.

### 3. Rasio Pertumbuhan

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P<sub>n</sub> = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

$P_0$  = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran.

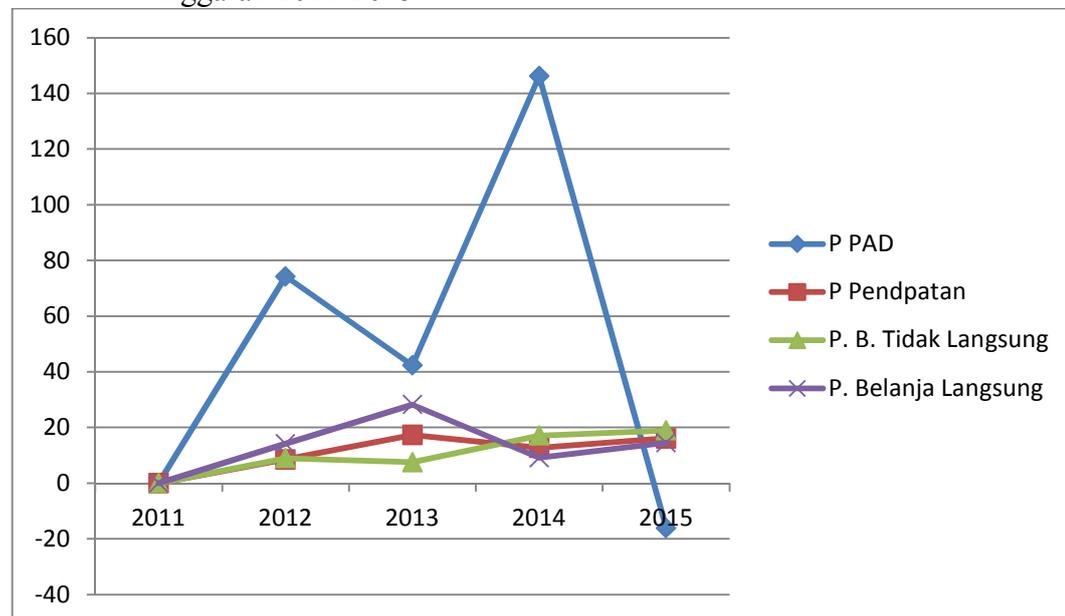
Hasil dari perhitungan dari Rasio Pertumbuhan dapat dilihat di tabel 12. Di bawah ini :

Tabel 11. Penghitungan Rasio Pertumbuhan DPKAD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2011-2015

Keterangan	Tahun					Rata-Rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
PAD	8.831.055.548,62	15.389.348.488,60	21.901.551.954,15	53.921.491.920,68	45.231.988.393,56	
Pertumbuhan PAD		74,26%	42,31%	146,19 %	-16,11 %	61,66 %
Pendapatan	468.533.180.713,62	508.575.045.828,60	596.607.458.712,56	672.757.348.789,68	782.530.360.623,56	
Pertumbuhan Pendapatan		8,54 %	17,30 %	12,76 %	16,13 %	13,61 %
Belanja Tidak langsung	282.728.222.244,03	308.096.282.086,38	331.206.122.884,28	387.926.871.310,38	461.453.337.188,60	
Pertumbuhan B. Tidak langsung		8,97%	7,50%	17,12 %	18,95 %	13,13 %
Belanja langsung	175.588.486.095,00	200.437.594.170,00	256.955.098.981,00	280.471.461.621,00	321.255.235.722,36	
Pertumbuhan B. Langsung		14,15 %	28,19 %	9,15 %	14,53 %	16,50 %

Sumber Data : DPKAD Kabupaten Majene (diolah)

Grafik 3. Penghitungan Rasio Pertumbuhan DPKAD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2011-2015



Sumber Data : DPKAD Kabupaten Majene (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 11. di atas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif meskipun fluktuatif. Mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2014 sebesar 146,16%. Pendapatan Daerah juga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,61%. Belanja tidak langsung pertumbuhannya sebesar 13,13%, dan pertumbuhan rata-rata Belanja langsung sebesar 16,50%.

### 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Belanja Operasi}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

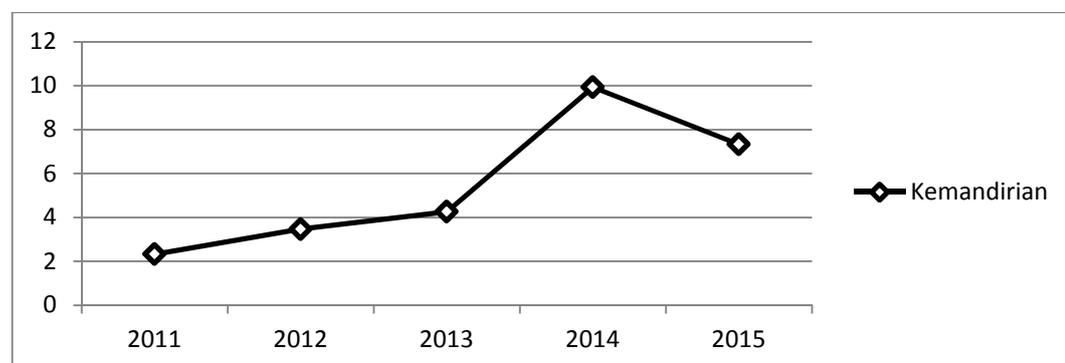
Hasil dari perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat di lihat di Tabel 12. di bawah ini :

Tabel 12. Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah DPKAD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun Anggaran	Realisasi PAD(Rp)	Pendapatan Dana Perimbangan(Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2011	8.831.055.548,62	378.305.489.050,00	2,33	Instruktif
2012	15.389.348.488,60	443.493.528.109,00	3,47	Instruktif
2013	21.901.551.954,15	513.649.266.423,00	4,26	Instruktif
2014	53.921.491.920,68	542.475.050.755,00	9,93	Instruktif
2015	45.231.988.393.56	616.672.780.689.00	7,33	Instruktif

Sumber Data : DPKAD Kabupaten Majene (diolah)

Grafik 4. Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah DPKAD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2011-2015



Sumber Data : DPKAD Kabupaten Majene (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 11. di atas kemampuan keuangan DPKAD Kabupaten Majene tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2011 dimana nilainya sebesar 2,33% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 9,93%. Tahun tahun lainnya yaitu tahun 2012, 2013, dan 2015 masing-masing sebesar : 3,47%, 4,26%, dan 7,33%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

### C. Pembahasan

#### 1. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD menunjukan bahwa anggaran PAD Kabupaten Majene rata-rata selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun kecuali pada tahun 2015 ada penurunan anggaran. tahun Pada tahun 2011 PAD dianggarkan sebesar Rp 7.933.928.730,00 atau 1,92% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2012 anggaran PAD dianggarkan sebesar Rp 22.641.980.322,21 atau 3,12% dari total anggaran pendapatan Kemudian pada tahun 2013 anggaran PAD Rp 24.022.773.160,00 atau 3,41% dari total anggaran pendapatan.. Pada tahun 2014 anggaran PAD Rp 53.921.491.920,68 atau 8,71% dari total anggaran pendapatan. PAD pada tahun 2015 diturunkan menjadi Rp 45.231.988.393.56 atau 6,13% dari total anggaran pendapatan.

Realisasi PAD Kabupaten Majene dari tahun Pada tahun 2011 PAD dianggarkan sebesar Rp 8.831.055.548,62 atau 1,76% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2012 anggaran PAD dianggarkan sebesar Rp 15.389.348.488,60 atau 4,54% dari total anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2013 anggaran PAD Rp 21.901.551.954,15 atau 4,19% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2014 anggaran PAD Rp 60.113.206.364,00 atau 9,70% dari total anggaran pendapatan. PAD pada tahun 2015 diturunkan menjadi Rp 45.910.511.046.56 atau 6,14% dari total anggaran pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan DPKAD Kabupaten Majene pada tahun 2011 sebesar 115,68%, tahun 2012 sebesar 67,97%, tahun 2013 sebesar 91,16%, tahun 2014 sebesar 89,69%, dan tahun 2015 sebesar 98,52%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Majene untuk tahun 2009 dan 2010 berjalan Efektif karena efektivitasnya diatas 100% . Untuk tahun 2012, 2013,2014 dan 2015 Belum Efektif karena nilai yang diperoleh masih dibawah 100%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Majene belum Efektif karena rata-rata efektivitasnya di bawah 100% yaitu 92,60%. Hal ini disebabkan karena minimnya pendapatan daerah yang berbanding terbalik terhadap tingkat belanja daerah yang sangat tinggi, terutama belanja pegawai di daerah majene 50% seluruh hasil belanja pegawai. Pemerintah Kabupaten Majene juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah terutama pada tahun 2011, namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus

terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

## 2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah Kabupaten Majene dari tahun 2011 sampai dengan 2015 rata-rata mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 pendapatan daerah Kabupaten Majene sebesar Rp 468.533.180.713,62, naik menjadi Rp 508.575.045.828,60 pada tahun 2012. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2013 menjadi Rp 596.607.458.712,56. Dan pada tahun 2014 terjadi kenaikan lagi belanja daerah menjadi Rp 672.757.348.789,68, naik kembali pada tahun 2015 menjadi Rp 782.530.360.623,56.

Total Belanja daerah Kabupaten Majene dari tahun 2011 sampai dengan 2015 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2011 total belanja daerah sebesar Rp 458.316.708.339,03. Mengalami kenaikan menjadi Rp

508.533.876.256,38 pada tahun 2012. Pada tahun 2013 total belanja daerah sebesar Rp 588.161.221.865,28 naik dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2014 naik menjadi Rp 668.398.232.931,38. Pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan menjadi Rp 782.708.572.910,96.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Majene tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 100,42% atau dapat dikatakan Efisien berimbang. Pada tahun 2011 Rasio Efisiensinya sebesar 102,29%, kemudian tahun 2012 menjadi 100,39%, tahun 2013 sebesar 98,77%, tahun 2014 sebesar 100,12%, dan tahun 2015 sebesar 100,56%.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Majene tergolong kurang Efisien yang hampir berimbang karena selisih yang sedikit antara belanja dan pendapatan dengan rata-rata rasionya 100,42%, Hanya ditahun 2013 yang efisien dengan efisiensi mencapai 98,77% meskipun efisiensinya hampir berimbang di tahun 2011, 2014 dan 2015. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Majene dalam hal ini masih kurang baik karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Majene dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

### 3. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Pendapatan dapat diketahui bahwa selalu terjadi kenaikan pendapatan daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2015 di Kabupaten Majene. Pada tahun 2011 pendapatan daerah Kabupaten Majene sebesar Rp 468.533.180.713,62, naik menjadi Rp 508.575.045.828,60 pada tahun 2012. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2013 menjadi Rp 596.607.458.712,56. Dan pada tahun 2014 terjadi kenaikan lagi belanja daerah menjadi Rp 672.757.348.789,68, naik kembali pada tahun 2015 menjadi Rp 782.530.360.623,56.

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun yang selalu mengalami kenaikan maka dapat dikatakan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Majene mengalami pertumbuhan secara positif. Tahun 2012 tumbuh 8,54% dibandingkan tahun sebelumnya akan tetapi yang terendah dibandingkan pertumbuhan tahun yang lain. Tahun 2013 mengalami kenaikan paling tinggi yaitu sebesar 17,30% dari tahun sebelumnya. tahun 2014 sebesar 12,76% dan tahun 2015 sebesar 16,31%.

Upaya pemerintah Kabupaten Majene untuk selalu meningkatkan pendapatan daerahnya bisa dikatakan berhasil meskipun sebagian besar pendapatannya masih bersumber dari bantuan dari pihak pusat. PAD masih kecil dibandingkan dengan bantuan dari pusat. Agar kedepannya kinerja daerah bisa meningkat dan optimal lagi maka seharusnya pemerintah Kabupaten Majene selalu mengoptimalkan pendapatan daerahnya dari sektor PAD.

Realisasi PAD Kabupaten Majene dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2011 PAD dianggarkan sebesar

Rp 8.831.055.548,62 atau 1,76% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2012 anggaran PAD dianggarkan sebesar Rp 15.389.348.488,60 atau 4,54% dari total anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2013 anggaran PAD Rp 21.901.551.954,15 atau 4,19% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2014 anggaran PAD Rp 60.113.206.364,00 atau 9,70% dari total anggaran pendapatan. PAD pada tahun 2015 diturunkan menjadi Rp 45.910.511.046,56 atau 6,14% dari total anggaran pendapatan.

Berdasarkan penghitungan Rasio Pertumbuhan PAD, PAD Kabupaten Majene fluktuatif. Rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar 61,66%. Mengalami peningkatan pada tahun 2012 yaitu sebesar (42,31%), dan sempat mengalami penurunan 42,31% pada tahun 2013, dan mengalami pertumbuhan lagi sebesar 146,19% dan turun di tahun berikutnya menjadi (16,11%.) Pemerintah Kabupaten Majene harus selalu meningkatkan PAD nya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Akan lebih baik apabila tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya dengan PAD yang tinggi.

Total Realisasi Belanja Tidak Langsung daerah yang terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Bantuan Keuangan selalu terjadi peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Masing-masing sebesar : Rp 282.728.222.244,03; Rp 308.096.282.086,38; Rp 331.206.122.884,28; Rp 387.926.871.310,38; dan Rp 461.453.337.188,60. Total Realisasi Belanja Modal

yang terdiri atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya, dan Belanja Aset Lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2011 dan 2015, sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun Rasio Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2012 tumbuh 8,97% dan Tahun 2013 mengalami penurunan yaitu sebesar 7,12% dari tahun sebelumnya. Tahun 2014 sebesar 17,12% dan tahun 2015 turun lagi sebesar 11,91%. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 18,95%.

Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung juga mengalami kenaikan dan penurunan, sebesar 14,15% pada tahun 2012 kemudian naik menjadi 28,19% pada tahun 2013. Mengalami penurunan 9,15% pada tahun 2014 dan naik lagi 14,53% pada tahun 2015. Sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 16,50%.

Jika dilihat dari perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung dan Langsung bisa dikatakan baik, terutama pertumbuhan Rasio Belanja Langsung yang hanya mengalami sekali penurunan sedangkan untuk Rasio Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2015. Apabila pemerintah daerah berani mengurangi Belanja Tidak langsung untuk dialokasikan ke Belanja Langsung terutama pada sektor belanja modal maka dapat dikatakan Pemerintah Daerah tersebut mengutamakan pembangunan di daerahnya.

#### 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Diketahui jika realisasi PAD Kabupaten Majene dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2011 PAD Kabupaten Majene sebesar Rp 8.831.055.548, atau 1,76% dari total anggaran pendapatan. Mengalami Kenaikan pada tahun 2012 yaitu menjadi Rp 15.389.348.488,60 atau 4,54% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2013 PAD Kabupaten Majene naik menjadi Rp 73.513.164.444,00 atau sebesar 5,77% dari total pendapatan. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 60.113.206.364,00 atau 9,70% dari total anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 45.910.511.046.56 atau 6,14% dari total anggaran pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 sebesar 378.305.489.050,00, kemudian pada tahun 2012 mengalami kenaikan 17,23% atau sebesar 443.493.528.109,00. Pada tahun 2013 sebesar 513.649.266.423,00 atau naik 15,81% dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami peningkatan sebesar 5,61% atau menjadi 542.475.050.755,00 pada tahun 2014. Pada tahun 2013 kembali mengalami kenaikan sebesar 13,67% atau menjadi 616.672.780.689.00. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak,

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Berdasarkan hasil perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kemampuan keuangan DPKAD Kabupaten Majene tergolong Rendah Sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Berawal pada tahun 2011 Rasio Kemandirian sebesar 3,33%, kemudian naik menjadi 3,47% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 Rasio Kemandirian sebesar 4,26% kemudian naik pada tahun 2014 sebesar 9,93%. Pada tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 7,33%. Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0% - 25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Majene memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kebumen dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi Kemandirian Keuangan DPKAD Kabupaten Majene secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Majene sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Majene jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong tidak Efektif, karena rata-rata efektivitasnya dibawah 100% yaitu 92,60%.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Majene jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah kurang Efisien dan hampir berimbang, rata-rata rasionya sebesar 100,29%.
3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Majene jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 61,66% lebih bagus bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatannya yang hanya sebesar 13,61%. Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung Kabupaten Majene mengalami pertumbuhan secara positif, rata-rata pertumbuhannya sebesar 16,50%

dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan belanja Tidak Langsung yang sebesar 13,13%.

4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Majene jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif.
5. Hipotesis yang ditunjukkan pada penulis yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian menunjukkan tidak tercapai efektivitas dan efisiensinya sehingga hipotesis di tolak sedangkan rasio pertumbuhannya sesuai dengan hipotesis yang di ajukan.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen

Pemerintah Kabupaten Majene harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sebenarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Majene mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Potensi tersebut antara lain : di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, industri kreatif hingga perdagangan. Apabila pemerintah Kabupaten Majene mampu memaksimalkan potensi tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten Majene selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Majene juga seharusnya tidak selalu

mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 5 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 kabupaten saja tetapi lebih luas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2004, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat: Jakarta.
- Abdul Rohman. (2009). *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 9 No. 1:21-32. (16 Februari 2011).
- Agus Dwiyanto.2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.Yogyakarta : Gajah Mada University Press, Cet Ke-3.
- Abas, Rahmawati. 2011. *Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas laporan keuangan Pemda Kab. Gorontalo*. Skripsi S1. Akuntansi UNG
- Adrian Siutet. 2009. *Implementasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*.Jakarta : Penertbit Sinar Grafika.
- Aryanto, Rudi. 2011. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan, Jurnal Ilmiah Volume III No.2 ISSN: 1979-0759, Hal. 1-13*.
- Astuti, Afriyanto Weni. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Universitas Pasir Pangarayan, Vol 1 No 1 2013*.
- Bastian, Indra. 2009. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. BPFE Yogyakarta.
- Darise, Nurlan. 2008. Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks. Jakarta.
- Hendra Mizkan, Kamaliah, Restu Agusti. 2015. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Pekanbaru*. Jurnal SOROT, Volume 10, Nomor 1, April 2015 halaman 1 – 142 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

- Iman Pirman Hidayat (2008). *Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD*. ISSN :1907-9958.
- Miratanian. 2010. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah*. Skripsi Unikom
- Mutakin, Zalinal. 2008. *Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik (Studi Kasus pada Beberapa Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)*.
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 134 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Rahmad Hidayat 2009. Artikel ilmiah. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Padang Pariaman)*
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Cetakan Kedua. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang *Sumber-Sumber Keuangan Daerah*.
- Usman. 2012. Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol 05, No 01.
- Veithzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari (2009). *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.ISSN:1907-9958



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PELAKSANAAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2011

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	458.156.607.760,23	468.533.180.713,62	10.376.572.953,39	102,26
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.933.928.730,00	8.831.055.548,62	897.126.818,62	111,31
4	1 Hasil Pajak Daerah	1.762.386.340,00	1.766.000.726,00	3.614.386,00	100,21
4	1 2 Hasil Retribusi Daerah	2.657.521.600,00	2.261.629.035,00	(395.892.565,00)	85,10
4	1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.356.480.790,00	1.356.480.790,00	-	100,00
4	1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.157.540.000,00	3.446.944.997,62	1.289.404.997,62	159,76
4	2 DANA PERIMBANGAN	374.529.776.937,00	378.305.489.050,00	3.775.712.113,00	101,01
4	2 1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	26.115.465.937,00	30.089.530.050,00	3.974.064.113,00	115,22
4	2 2 Dana Alokasi Umum	300.811.411.000,00	300.620.559.000,00	(190.852.000,00)	99,94
4	2 2 Dana Alokasi Khusus	47.602.900.000,00	47.595.400.000,00	(7.500.000,00)	99,98
4	3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	75.692.902.093,23	81.396.636.115,00	5.703.734.021,77	107,54
4	3 1 Pendapatan Hibah	1.775.000.000,00	561.889.000,00	(1.213.111.000,00)	31,66
4	3 2 Dana bagi hasil pajak dari provinsi	3.875.404.893,23	4.965.481.715,00	1.090.076.821,77	128,13
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	70.042.497.200,00	75.869.265.400,00	5.826.768.200,00	108,32
	JUMLAH PENDAPATAN	458.156.607.760,23	468.533.180.713,62	10.376.572.953,39	102,26
5	BELANJA DAERAH	468.656.607.760,23	458.316.708.339,03	(10.339.899.421,20)	97,79
5	1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	273.681.054.506,83	282.728.222.244,03	9.047.167.737,20	103,31
5	1 1 Belanja Pegawai	235.542.368.435,11	246.741.262.107,00	11.198.893.671,89	104,75
5	1 2 Belanja Bunga	360.225.000,00	360.125.000,00	(100.000,00)	99,97
5	1 3 Belanja Subsidi	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	-
5	1 4 Belanja Hibah	17.498.437.000,00	16.598.554.535,00	(899.882.465,00)	94,86
5	1 5 Belanja Bantuan Sosial	4.290.000.000,00	3.385.255.909,25	(904.744.090,75)	78,91
5	1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	595.974.473,20	316.533.049,75	(279.441.423,45)	53,11
5	1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	14.154.049.598,52	14.071.167.293,03	(82.882.305,49)	99,41
5	1 8 Belanja Tidak Terduga	1.200.000.000,00	1.255.324.350,00	55.324.350,00	104,61
5	2 BELANJA LANGSUNG	194.975.553.253,40	175.588.486.095,00	(19.387.067.158,40)	90,06
5	2 1 Belanja Pegawai	16.376.049.800,00	15.296.774.288,00	(1.079.275.512,00)	93,41
5	2 2 Belanja Barang dan Jasa	57.662.526.400,00	52.286.520.446,00	(5.376.005.954,00)	90,68
5	2 3 Belanja Modal	120.936.977.053,40	108.005.191.361,00	(12.931.785.692,40)	89,31
	* Belanja Modal Tanah	4.300.000.000,00	4.228.806.000,00	(71.194.000,00)	98,34
	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.029.302.196,00	20.442.871.094,00	(7.586.431.102,00)	72,93
	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.783.252.000,00	21.472.930.020,00	(4.310.321.980,00)	83,28
	* Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	62.246.747.757,40	61.294.134.247,00	(952.613.510,40)	98,47
	* Aset Tetap Lainnya	577.675.100,00	566.450.000,00	(11.225.100,00)	98,06
	* Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	* Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	468.656.607.760,23	458.316.708.339,03	(10.339.899.421,20)	97,79
	Surplus ( Defisit )	(10.500.000.000,00)	10.216.472.374,59	20.716.472.374,59	(97,30)



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI  
NOMOR : 22 TAHUN 2013  
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2013

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	520.714.654.099,21	508.575.045.828,60	(12.139.608.270,61)	97,67
4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	22.641.980.322,21	15.389.348.488,60	(7.252.631.833,61)	67,97
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	6.145.174.266,00	2.923.281.806,89	(3.221.892.459,11)	47,57
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	11.907.069.264,00	6.987.523.381,00	(4.919.545.883,00)	58,68
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.429.676.092,21	1.429.676.092,21	-	100,00
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.160.060.700,00	4.048.867.208,50	888.806.508,50	128,13
4 2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	447.443.212.039,00	443.493.528.109,00	(3.949.683.930,00)	99,12
4 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	33.342.753.039,00	29.393.069.109,00	(3.949.683.930,00)	88,15
4 2 2	Dana Alokasi Umum	361.181.229.000,00	361.181.229.000,00	-	100,00
4 2 2	Dana Alokasi Khusus	52.919.230.000,00	52.919.230.000,00	-	100,00
4 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH</b>	50.629.461.738,00	49.692.169.231,00	(937.292.507,00)	98,15
4 3 1	Pendapatan Hibah	2.291.090.500,00	1.623.001.000,00	(668.089.500,00)	70,84
4 3 2	Dana bagi hasil pajak dari provinsi	6.144.718.238,00	5.875.515.231,00	(269.203.007,00)	95,62
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.193.653.000,00	42.193.653.000,00	-	100,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	520.714.654.099,21	508.575.045.828,60	(12.139.608.270,61)	97,67
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	522.748.108.168,06	508.533.876.256,38	(14.214.231.911,68)	97,28
5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	304.900.214.398,06	308.096.282.086,38	3.196.067.688,32	101,05
5 1 1	Belanja Pegawai	283.242.889.292,06	287.823.632.048,00	4.580.742.755,94	101,62
5 1 4	Belanja Hibah	4.334.500.000,00	3.719.500.000,00	(615.000.000,00)	85,81
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	4.436.075.000,00	3.809.167.494,72	(626.907.505,28)	85,87
5 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	507.113.338,00	506.915.776,71	(197.561,29)	99,96
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	11.529.636.768,00	11.450.686.766,95	(78.950.001,05)	99,32
5 1 8	Belanja Tidak Terduga	850.000.000,00	786.380.000,00	(63.620.000,00)	92,52
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	217.847.893.770,00	200.437.594.170,00	(17.410.299.600,00)	92,01
5 2 1	Belanja Pegawai	20.994.011.340,00	18.992.930.390,00	(2.001.080.950,00)	90,47
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	75.584.864.433,00	69.114.959.943,00	(6.469.904.490,00)	91,44
5 2 3	Belanja Modal	121.269.017.997,00	112.329.703.837,00	(8.939.314.160,00)	92,63
	* Belanja Modal Tanah	8.569.700.000,00	7.357.005.000,00	(1.212.695.000,00)	85,85
	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.109.553.294,00	28.160.732.960,00	(2.948.820.334,00)	90,52
	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.649.764.165,00	44.799.411.741,00	(2.850.352.424,00)	94,02
	* Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.588.350.538,00	31.683.804.136,00	(1.904.546.402,00)	94,33
	* Aset Tetap Lainnya	351.650.000,00	328.750.000,00	(22.900.000,00)	93,49
	* Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	* Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	522.748.108.168,06	508.533.876.256,38	(14.214.231.911,68)	97,28
	Surplus ( Defisit )	(2.033.454.068,85)	41.169.872,22	2.074.623.641,07	(2,02)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / ( KURANG )	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH	10.500.000.000,00	(6.652.478.705,74)	(17.152.478.705,74)	(62)
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	19.000.000.000,00	10.302.594.298,26	(8.697.405.701,74)	54
	Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu		1.879.834.025,26	1.879.834.025,26	
6 1 2	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	18.000.000.000,00	8.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)	44
6 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	422.760.273,00	(577.239.727,00)	42
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.500.000.000,00	16.955.073.004,00	8.455.073.004,00	19
6 2 2	Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	-	10
6 2 3	Pembayaran pokok utang	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	10
	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	-	8.223.573.004,00	8.223.573.004,00	
	Pembayaran Pengembalian Tambahan Penghasilan	-	231.500.000,00	231.500.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	10.500.000.000,00	(6.652.478.705,74)	(17.152.478.705,74)	(62)
6 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA )	-	3.563.993.668,85	3.563.993.668,85	

Majene, 6 September 2012

BUKATI MAJENE

H.KALMA KATTA



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI  
NOMOR : 22 TAHUN 2013  
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2013

KODE REKENDING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	520.714.654.099,21	508.575.045.828,60	(12.139.608.270,61)	97,67
4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	22.641.980.322,21	15.389.348.488,60	(7.252.631.833,61)	67,97
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	6.145.174.266,00	2.923.281.806,89	(3.221.892.459,11)	47,57
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	11.907.069.264,00	6.987.523.381,00	(4.919.545.883,00)	58,68
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.429.676.092,21	1.429.676.092,21	-	100,00
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.160.060.700,00	4.048.867.208,50	888.806.508,50	128,13
4 2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	447.443.212.039,00	443.493.528.109,00	(3.949.683.930,00)	99,12
4 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	33.342.753.039,00	29.393.069.109,00	(3.949.683.930,00)	88,15
4 2 2	Dana Alokasi Umum	361.181.229.000,00	361.181.229.000,00	-	100,00
4 2 2	Dana Alokasi Khusus	52.919.230.000,00	52.919.230.000,00	-	100,00
4 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH</b>	50.629.461.738,00	49.692.169.231,00	(937.292.507,00)	98,15
4 3 1	Pendapatan Hibah	2.291.090.500,00	1.623.001.000,00	(668.089.500,00)	70,84
4 3 2	Dana bagi hasil pajak dari provinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	6.144.718.238,00 42.193.653.000,00	5.875.515.231,00 42.193.653.000,00	(269.203.007,00) -	95,62 100,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	520.714.654.099,21	508.575.045.828,60	(12.139.608.270,61)	97,67
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	522.748.108.168,06	508.533.876.256,38	(14.214.231.911,68)	97,28
5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	304.900.214.398,06	308.096.282.086,38	3.196.067.688,32	101,05
5 1 1	Belanja Pegawai	283.242.889.292,06	287.823.632.048,00	4.580.742.755,94	101,62
5 1 4	Belanja Hibah	4.334.500.000,00	3.719.500.000,00	(615.000.000,00)	85,81
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	4.436.075.000,00	3.809.167.494,72	(626.907.505,28)	85,87
5 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	507.113.338,00	506.915.776,71	(197.561,29)	99,96
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	11.529.636.768,00	11.450.686.766,95	(78.950.001,05)	99,32
5 1 8	Belanja Tidak Terduga	850.000.000,00	786.380.000,00	(63.620.000,00)	92,52
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	217.847.893.770,00	200.437.594.170,00	(17.410.299.600,00)	92,01
5 2 1	Belanja Pegawai	20.994.011.340,00	18.992.930.390,00	(2.001.080.950,00)	90,47
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	75.584.864.433,00	69.114.959.943,00	(6.469.904.490,00)	91,44
5 2 3	Belanja Modal	121.269.017.997,00	112.329.703.837,00	(8.939.314.160,00)	92,63
	* Belanja Modal Tanah	8.569.700.000,00	7.357.005.000,00	(1.212.695.000,00)	85,85
	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.109.553.294,00	28.160.732.960,00	(2.948.820.334,00)	90,52
	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.649.764.165,00	44.799.411.741,00	(2.850.352.424,00)	94,02
	* Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.588.350.538,00	31.683.804.136,00	(1.904.546.402,00)	94,33
	* Aset Tetap Lainnya	351.650.000,00	328.750.000,00	(22.900.000,00)	93,49
	* Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	* Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	522.748.108.168,06	508.533.876.256,38	(14.214.231.911,68)	97,28
	Surplus ( Defisit )	(2.033.454.068,85)	41.169.872,22	2.074.623.641,07	(2,02)



KABUPATEN MAJENE  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013

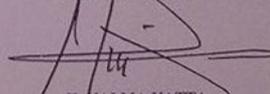
LAMPIRAN 1: PERATURAN DAERAH  
NOMOR : 1 TAHUN 2014  
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2014

NO. URUT	URAIAN	Jumlah (Rp.)		BERTAMBAH(KURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	7	8
4	PENDAPATAN DAERAH	597.336.447.221,41	596.607.458.712,56	(728.988.508,85)	99,88
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.022.771.160,00	21.901.551.954,15	(2.121.219.205,85)	91,17
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	3.170.150.000,00	3.752.823.648,00	582.673.648,00	118,70
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	16.358.493.453,00	13.298.333.298,87	(3.060.160.154,13)	81,29
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.940.789.259,00	1.940.789.259,00	-	100,00
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.553.338.448,00	2.899.585.748,28	346.247.300,28	113,55
4 2	DANA PERIMBANGAN	512.207.852.053,00	513.649.266.423,00	1.441.414.370,00	100,28
4 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	24.288.155.053,00	25.729.589.423,00	1.441.414.370,00	105,91
4 2 2	Dana Alokasi Umum	416.986.177.000,00	416.986.177.000,00	-	100,00
4 2 2	Dana Alokasi Khusus	70.933.520.000,00	70.933.520.000,00	-	100,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	61.105.824.008,41	61.056.640.335,41	(49.183.673,00)	99,92
4 3 1	Pendapatan Hibah	1.030.504.000,00	1.021.492.000,00	(9.012.000,00)	99,13
4 3 3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi	6.789.556.008,41	6.749.384.335,41	(40.171.673,00)	99,41
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	50.660.764.000,00	50.660.764.000,00	-	100,00
4 3 5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00	-	100,00
	Jumlah PENDAPATAN	597.336.447.221,41	596.607.458.712,56	(728.988.508,85)	99,88
5	BELANJA DAERAH	590.037.251.765,41	588.161.221.865,28	(1.876.029.900,13)	99,68
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	313.608.162.813,41	331.206.122.884,28	17.597.960.070,87	105,61
5 1 1	Belanja Pegawai	286.433.500.723,11	304.890.546.883,00	18.457.046.159,89	106,44
5 1 4	Belanja Hibah	7.914.200.000,00	7.600.950.000,00	(313.250.000,00)	96,04
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	2.832.900.000,00	2.499.506.106,74	(333.393.893,26)	88,23
5 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	1.763.002.745,30	1.648.139.862,30	(114.862.883,00)	93,48
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	14.114.559.345,00	14.080.339.332,24	(34.220.012,76)	99,76
5 1 8	Belanja Tidak Terduga	550.000.000,00	486.640.700,00	(63.359.300,00)	88,48
5 2	BELANJA LANGSUNG	276.429.088.952,00	256.955.098.981,00	(19.473.989.971,00)	92,96
5 2 1	Belanja Pegawai	27.670.742.155,00	26.143.695.296,00	(1.527.046.859,00)	94,48
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	106.115.453.377,00	99.789.243.733,00	(6.326.209.644,00)	94,04
5 2 3	Belanja Modal	142.642.893.420,00	131.022.159.952,00	(11.620.733.468,00)	91,85
	* Belanja Modal Tanah	9.635.000.000,00	7.209.557.500,00	(1.825.442.500,00)	79,80
	- Tanah	9.035.000.000,00	7.209.557.500,00	(1.825.442.500,00)	79,80
	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.648.223.200,00	22.578.573.003,00	(1.069.650.197,00)	95,48
	- Alat-alat Berat	544.888.000,00	544.321.000,00	(567.000,00)	99,90
	- Alat-alat Angkutan	5.075.815.000,00	4.698.632.632,00	(377.182.368,00)	92,57
	- Alat Bengkel	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-
	- Alat Perikanan dan Peternakan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00
	- Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	8.188.374.100,00	7.601.394.491,00	(586.979.609,00)	92,83
	- Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	1.166.530.000,00	1.105.987.000,00	(60.543.000,00)	94,81
	- Alat Ukur	122.833.800,00	122.800.000,00	(33.800,00)	99,97
	- Alat-alat Kedokteran	1.164.058.000,00	1.134.006.880,00	(30.051.120,00)	97,42
	- Alat Laboratorium	7.344.724.300,00	7.336.431.000,00	(8.293.300,00)	99,89
	- Alat Keamanan	-	-	-	-
	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.216.167.718,00	51.955.370.897,00	(5.260.796.821,00)	90,81
	- Bangunan Gedung	57.216.167.718,00	51.955.370.897,00	(5.260.796.821,00)	90,81
	- Bangunan Monumen	-	-	-	-

6		PEMBIAYAAN DAERAH	2.033.454.068,85	1.741.630.371,85	(291.823.697,00)	85,65
6	1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.063.993.668,85	3.722.160.971,85	(341.832.697,00)	91,59
6	1	1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	3.563.993.668,85	3.563.942.665,85	(51.003,00)	100,00
6	1	5 Penerimaan Pinjaman Daerah	500.000.000,00	158.218.306,00	(341.781.694,00)	31,64
6	2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.030.539.600,00	1.980.530.600,00	(50.009.000,00)	97,54
6	2	2 Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.450.000.000,00	(50.000.000,00)	96,67
6	2	3 Pembayaran pokok utang	530.539.600,00	530.530.600,00	(9.000,00)	100,00
		PEMBIAYAAN NETTO	2.033.454.068,85	1.741.630.371,85	(291.823.697,00)	85,65
6	3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA )	0,00	1.782.799.944,07	1.782.799.944,07	-

Maene, 17 September 2013

BUPATI MAJENE



H. KALMA KATTA



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
 NOMOR : 10 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2015

KABUPATEN MAJENE  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2014

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(KURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	7	8
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	679.593.174.306,36	672.757.348.789,68	(6.835.825.516,68)	98,99
4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	60.113.206.364,00	53.921.491.920,68	(6.191.714.443,32)	89,78
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	5.625.260.000,00	4.444.442.726,00	(1.180.817.274,00)	79,01
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	49.319.772.299,00	43.910.442.192,96	(5.409.330.106,04)	89,03
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.255.714.898,00	2.255.714.898,00	-	100,00
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.912.459.167,00	3.310.892.103,72	398.432.936,72	113,68
4 2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	540.874.512.264,00	542.475.050.755,00	1.600.538.491,00	100,30
4 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	15.457.798.264,00	17.058.336.755,00	1.600.538.491,00	110,35
4 2 2	Dana Alokasi Umum	457.679.754.000,00	457.679.754.000,00	-	100,00
4 2 2	Dana Alokasi Khusus	67.736.960.000,00	67.736.960.000,00	-	100,00
4 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH</b>	78.605.455.678,36	76.369.806.114,00	(2.244.649.564,36)	97,14
4 3 1	Pendapatan Hibah	268.820.000,00	381.244.200,00	112.424.200,00	141,82
4 3 3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi	10.906.341.678,36	8.549.267.914,00	(2.357.073.764,36)	78,39
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.748.794.000,00	62.748.794.000,00	-	100,00
4 3 5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	4.681.500.000,00	4.681.500.000,00	-	100,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	679.593.174.306,36	672.757.348.789,68	(6.835.825.516,68)	98,99
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	680.417.155.357,41	668.398.232.931,38	(12.018.922.426,03)	98,23
5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	349.863.358.844,41	387.926.671.310,38	38.063.312.465,97	110,88
5 1 1	Belanja Pegawai	322.233.612.447,45	326.068.988.092,00	3.835.375.644,55	101,19
5 1 4	Belanja Hibah	5.750.000.000,00	41.721.522.725,00	35.971.522.725,00	725,59
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	3.521.000.000,00	3.147.589.256,00	(373.410.744,00)	89,39
5 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	1.259.514.832,00	995.156.136,40	(264.358.695,60)	79,01
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	16.524.231.564,56	15.441.731.563,98	(1.082.500.000,58)	93,45
5 1 8	Belanja Tidak Terduga	575.000.000,00	551.683.537,00	(23.316.463,00)	95,94
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	330.553.796.513,00	280.471.561.621,00	(50.082.234.892,00)	84,85
5 2 1	Belanja Pegawai	46.756.483.139,00	43.417.257.977,00	(3.339.225.162,00)	92,86
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	148.356.101.524,00	104.835.964.636,00	(43.520.136.888,00)	70,67
5 2 3	Belanja Modal	135.441.211.850,00	132.218.339.008,00	(3.222.872.842,00)	97,62
	* Belanja Modal Tanah	7.626.000.000,00	7.545.109.300,00	(80.890.700,00)	98,94
	- Tanah	7.626.000.000,00	7.545.109.300,00	(80.890.700,00)	98,94
	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.816.376.505,00	20.193.546.345,00	(2.622.830.160,00)	88,50
	- Alat-alat Berat	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
	- Alat-alat Angkutan	5.804.670.967,00	5.772.368.440,00	(32.302.527,00)	99,44
	- Alat Bengkel	13.225.000,00	13.225.000,00	-	100,00
	- Alat Pertanian dan Peternakan	217.900.000,00	217.900.000,00	-	100,00
	- Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	8.646.962.300,00	8.338.580.400,00	(308.381.900,00)	96,43
	- Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	941.692.560,00	930.652.500,00	(11.040.000,00)	98,83
	- Alat Ukur	24.500.000,00	23.207.000,00	(1.293.000,00)	94,72
	- Alat-alat Kedokteran	774.214.000,00	756.327.000,00	(17.887.000,00)	97,69
	- Alat Laboratorium	6.368.211.738,00	4.116.286.005,00	(2.251.925.733,00)	64,64
	- Alat Keamanan	-	-	-	-
	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.618.967.795,00	38.321.299.022,00	(297.668.773,00)	99,23
	- Bangunan Gedung	38.618.967.795,00	38.321.299.022,00	(297.668.773,00)	99,23
	- Bangunan Monumen	-	-	-	-
	* Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	65.903.968.800,00	65.682.494.991,00	(221.473.809,00)	99,66
	- Jalan dan Jembatan	30.628.307.500,00	30.616.994.416,00	(11.313.084,00)	99,96
	- Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-	-
	- Instalasi	288.361.000,00	288.361.000,00	-	100,00
	- Jaringan	34.987.300.300,00	34.777.139.375,00	(210.160.925,00)	99,40
	* Aset Tetap Lainnya	475.898.750,00	475.889.350,00	(9.400,00)	100,00
	- Buku dan Perpustakaan	386.550.000,00	386.540.600,00	(9.400,00)	100,00

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(KURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	7	8
	* Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	52.716.502.502,00	49.261.658.552,00	(3.454.843.950,00)	93,45
	- Jalan dan Jembatan	34.669.717.002,00	33.222.151.815,00	(1.447.565.187,00)	95,82
	- Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-	-
	- Instalasi	495.600.000,00	117.775.000,00	(377.825.000,00)	23,76
	- Jaringan	17.551.185.500,00	15.921.731.737,00	(1.629.453.763,00)	90,72
	* Aset Tetap Lainnya	27.000.000,00	17.000.000,00	(10.000.000,00)	62,96
	- Buku dan Perpustakaan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00
	- Barang Bercorak	14.000.000,00	4.000.000,00	(10.000.000,00)	28,57
	- Kesenian dan Kebudayaan	-	-	-	-
	- Hewan / Ternak dan Tumbuhan	-	-	-	-
	* Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	* Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	590.037.251.765,41	588.161.221.865,28	(1.876.029.900,13)	99,68
	Surplus ( Defisit )	7.299.195.456,00	8.446.236.847,28	1.147.041.391,28	115,71
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(7.299.195.456,00)	(7.672.255.796,23)	(373.060.340,23)	105,11
6	1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.282.799.944,00	1.663.252.903,77	(619.547.040,23)	72,86
	Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	1.782.799.944,00	1.633.858.388,07	(148.941.555,93)	91,65
6	1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah	500.000.000,00	29.394.515,70	(470.605.484,30)	5,88
6	2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.581.995.400,00	9.335.508.700,00	(246.486.700,00)	97,43
6	2 2 Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah	700.000.000,00	500.000.000,00	(200.000.000,00)	71,43
	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	8.881.995.400,00	8.835.508.700,00	(46.486.700,00)	99,48
	PEMBIAYAAN NETTO	(7.299.195.456,00)	(7.672.255.796,23)	(373.060.340,23)	105,11
6	3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkecanaan ( SILPA )	0,00	773.981.051,05	773.981.051,05	-

Majene, 13 Agustus 2014

BUPATI MAJENE

H. KALMA KATTA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI  
NOMOR : 26 TAHUN 2016  
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2016

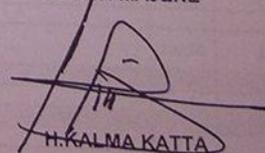
**KABUPATEN MAJENE**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	793.626.751.412,97	782.530.360.623,56	(11.096.390.789,41)	98,60
4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	48.910.511.046,56	45.231.988.393,56	(3.678.522.653,00)	92,48
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	6.970.000.000,00	5.634.570.646,00	(1.335.429.354,00)	80,83
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	13.151.511.500,00	12.086.249.408,76	(1.065.262.091,24)	91,90
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.665.519.102,61	2.665.519.102,61	-	100,00
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.023.480.443,95	24.845.649.236,19	(2.177.831.207,76)	91,94
4 2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	622.742.079.000,00	616.672.780.689,00	(6.069.298.311,00)	99,03
4 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	20.814.037.000,00	14.742.718.689,00	(6.071.318.311,00)	70,83
4 2 2	Dana Alokasi Umum	504.387.592.000,00	504.387.592.000,00	-	100,00
4 2 2	Dana Alokasi Khusus	97.540.450.000,00	97.542.470.000,00	2.020.000,00	100,00
4 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH</b>	121.974.161.266,41	120.625.591.541,00	(1.348.569.725,41)	98,89
4 3 1	Pendapatan Hibah	1.489.240.000,00	1.217.954.000,00	(271.286.000,00)	81,78
4 3 3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi	14.752.903.366,41	14.886.083.541,00	133.180.174,59	100,99
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	82.985.370.000,00	81.774.870.000,00	(1.210.500.000,00)	98,54
4 3 5	Bantuan keuangan khusus	4.965.000.000,00	4.965.000.000,00	-	100,00
4 3 5	Dana Desa	17.781.648.000,00	17.781.684.000,00	36.000,00	100,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	793.626.751.412,97	782.530.360.623,56	(11.096.390.789,41)	98,60
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	798.122.981.615,32	782.708.572.910,96	(15.414.408.704,36)	98,07
5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	429.992.199.012,01	461.453.337.188,60	31.461.138.176,59	107,32
5 1 1	Belanja Pegawai	366.049.028.982,91	367.193.805.847,00	1.144.776.864,09	100,31
5 1 4	Belanja Hibah	23.241.246.330,00	53.663.357.797,00	30.422.111.447,00	230,90
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	2.484.000.000,00	3.008.377.643,00	524.377.643,00	121,11
5 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.074.217.807,00	805.663.344,00	(268.554.463,00)	75,00
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	35.774.705.872,10	35.623.068.329,60	(151.637.542,50)	99,58
5 1 8	Belanja Tidak Terduga	1.369.000.000,00	1.159.064.228,00	(209.935.772,00)	84,67
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	368.130.782.603,31	321.255.235.722,36	(46.875.546.880,95)	87,27
5 2 1	Belanja Pegawai	38.790.974.388,00	36.854.479.434,70	(1.936.494.953,30)	95,01
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	156.458.519.891,31	116.703.994.792,66	(39.754.525.098,65)	74,59
5 2 3	Belanja Modal	172.881.288.124,00	167.696.761.495,00	(5.184.526.629,00)	97,00
	* Belanja Modal Tanah	7.805.000.000,00	7.470.401.100,00	(334.598.900,00)	95,71
	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.601.962.560,00	23.552.977.795,00	(1.048.984.765,00)	95,74
	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.095.180.268,00	48.454.990.787,00	(640.189.481,00)	98,76
	* Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	91.150.295.296,00	87.959.791.813,00	(3.190.503.483,00)	96,50
	* Aset Tetap Lainnya	228.850.000,00	228.600.000,00	(250.000,00)	99,89
	* Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	* Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	798.122.981.615,32	782.708.572.910,96	(15.414.408.704,36)	98,07
	Surplus ( Defisit )	(4.496.230.202,35)	(178.212.287,40)	4.318.017.914,95	(96,04)
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	4.496.230.202,35	3.921.002.404,06	(575.227.798,29)	87,21
6 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	5.696.230.202,35	5.121.002.404,06	(575.227.798,29)	89,90
6 1 1	Penggunaan SILPA	5.196.230.202,35	5.055.822.089,35	(140.408.113,00)	97,30
6 1 4	Penerimaan Kembali Pinjaman	500.000.000,00	65.180.314,71	(434.819.685,29)	13,04

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(KURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	7	8
	- Barang Bercorak	89.348.750,00	89.348.750,00	-	100,00
	- Kesenian dan Kebudayaan	-	-	-	-
	- Hewan / Ternak dan Tumbuhan	-	-	-	-
	* Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	* Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	680.417.155.357,41	668.398.232.931,38	(12.018.922.426,03)	98,23
	Surplus ( Defisit )	(823.981.051,05)	4.359.115.858,30	5.183.096.909,35	(529,03)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	823.981.051,35	837.114.344,05	13.133.293,00	101,59
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.273.981.051,05	837.114.344,05	(436.866.707,00)	65,71
	Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	773.981.051,05	773.981.051,05	-	100,00
6 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	500.000.000,00	63.133.293,00	(436.866.707,00)	12,63
		-	60.017.793,00	-	-
		-	1.680.000,00	-	-
		-	1.435.500,00	-	-
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	450.000.000,00	-	(450.000.000,00)	-
6 2 2	Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah	450.000.000,00	-	(450.000.000,00)	-
	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	823.981.051,05	837.114.344,05	13.133.293,00	101,59
6 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA )	(0,00)	5.196.230.202,35	5.196.230.202,35	-

MAJENE 22 OKTOBER 2015

BUPATI MAJENE

  
H. KALMA KATTA